STUDI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN

KECAMATAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

Revianty Nurmeyliandari

**Program Studi Teknik Sipil Universitas Bina Darma**

revianty\_nurmeyliandari@mail.binadarma.ac.id

Penyediaan Infrastruktur untuk daerah pedesaan menghadapi banyak permasalahan yaitu perencanaan yang lemah, kuantitas yang belum mencukupi, kualitas yang rendah, dan lain sebagainya. Di sisi lain infrastruktur merupakan penunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang sangat dibutuhkan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk dan sebaran kuantitas infrastruktur terkadang menjadi kendala lemahnya perencanaan akibat kurangnya informasi pemetaan kebutuhan infrastruktur. Pada studi ini dilakukan pemetaan infrastruktur terutama infrastruktur kesehatan pada tiap kecamatan di Kabupaten Muara Enim dengan memproyeksikan jumlah penduduk dari tahun 2012 hingga tahun 2032 dengan menggunakan metode proyeksi geometrik. Untuk memproyeksikan kebutuhan infrastruktur kesehatan (puskesmas, poskesdes, pustu) pada tiap kecamatan digunakan Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001). Analisa kebutuhan infrastruktur kesehatan pada tiap kecamatan di Kabupaten Muara Enim dari tahun 2012 hingga tahun 2032 dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Muara Enim membutuhkan penambahan 3 unit Puskesmas, 128 unit Poskesdes, dan 1 unit Puskesmas Pembantu untuk melayani kesehatan penduduk hingga akhir periode proyeksi.

***Kata Kunci*:** *Infrastruktur, Kesehatan, Kebutuhan*

**1. PENDAHULUAN**

Keberadaan sektor-sektor ekonomi terutama di wilayah pedesaan tidak terlepas dari sektor pertanian. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar mata pecaharian masyarakat di pedesaan berasal dari sektor pertanian yakni: perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura (**Almasdi Syahza, 2010)**. Saat ini pemerintah tidak hanya berorietasi memacu pembangunan di sektor industi tapi juga di sektor pertanian yang basisnya di daerah pedesaan.

Infrastruktur merupakan fasilitas fisik yang dapat menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang layak akan mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun untuk menyediakan infrastruktur yang layak tidaklah mudah. Masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur diantaranya; perencanaan yang lemah, kuantitas yang belum mencukupi, kualitas yang rendah, dan sebagainya (Hapsari, 2011).

Penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu masalah dalam peningkatan ekonomi masayarakat pedesaan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari kuantitas dan kualitas infrastruktur yang melayani masyarakat di pedesaan. Dibeberapa wilayah masyarakat harus menempuh jarak 6-10 km ke arah ibu kota kecamatan untuk memperoleh layanan (Andi Asnudin, 2009).

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 9.140,50 km². Secara administratif, Kabupaten Muara Enim terdiri dari 22 Kecamatan dan 321 desa/kelurahan (BPS, 2011).

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Muara Enim cukup pesat, dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 731.410 jiwa atau sebanyak 9,63% penduduk Provinsi Sumatera Selatan bertempat tinggal di Muara Enim (BPS, 2011).

Peningkatan jumlah penduduk dan sebaran jumlah infrastruktur yang akan melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat merupakan problematika dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Keterbatasan informasi, berupa pemetaan jumlah infrastruktur saat ini dan proyeksi kebutuhan infrastruktur di masa yang akan datang sebagai acuan, memperlemah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan demikian, dibutuhkan sebuah studi untuk memberikan analisa informasi pemetaan infrastruktur eksisting dan proyeksi kebutuhan di masa yang akan datang sehingga dapat dijadikan sebagai acuan informasi dalam proses pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur kesehatan pada kecamatan di Kabupaten Muara Enim.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Definisi

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi (Grigg, 1988).

Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).

2.2. Jenis Infrastruktur

The World Bank (1994) menggolongkan jenis infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, yaitu fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain).
3. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

2.3. Infrastruktur Kesehatan

Sebagai lembaga kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) memiliki definisi kesehatan yang merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial, dan bukan sekedar bebas

penyakit dan kelemahan fisik. Tingkat kesehatan digunakan untuk mengukur tingkat harapan hidup. Ukuran tersebut merupakan salah satu dari tiga komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas serta pelayanan kesehatan lainnya diharapkan meningkatkan mutu kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang merata. Pengembangan infrastruktur kesehatan, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor input pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Depkes, 2004 dalam Budi Mulia Warman Harahap, 2013).

2.4. Proyeksi Jumlah Penduduk

 Metode geometrik merupakan persentase kenaikan jumlah penduduk per periode tertentu digunakan sebagai acuan proyeksi jumlah penduduk. Persamaan yang digunakan dalam metode ini yaitu :

Dimana, i = persentase pertumbuhan jumlah penduduk. Metode ini menghasilkan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar yang umumnya diterapkan pada kota-kota yang memiliki wilayah yang tidak terbatas untuk perluasan kota.

2.5. Standard Pelayanan Minimal

 Berdasarkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001). Standard pelayanan minimal untuk infrastruktur kesehatan adalah sebagai berikut:

1. 1 unit Balai Pengobatan/3.000 jiwa
2. 1 unit BKIA/RS Bersalin/Puskesmas Pembantu 10.000-30.000 jiwa
3. 1 unit Puskesmas/ 120.000 jiwa

**3. METODOLOGI**

3.1. Lingkup Studi

 Studi ini dilakukan pada infrastruktur kesehatan di 22 Kecamatan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Infrastruktur pelayanan kesehatan tersebut meliputi Poskesdes, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Puskesmas. Kecamatan tempat lokasi studi dapat dilihat pada Tabel 1.

3.2. Metode Pengumpulan Data

 Pengumpulan data pada studi dilakukan untuk memperoleh data baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei lapangan yaitu dengan melakukan pendataan (inventarisasi dan identifikasi) terhadap infrastruktur kesehatan. Data sekunder diperoleh dari sumber data antara lain Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan dan Muara Enim, Bappeda Muara Enim, Dinas Kesehatan, dan dinas/instansi yang ada hubungannya dengan studi ini.

3.3. Metode Analisa

 Dalam menganalisa proyeksi kebutuhan infrastruktur kesehatan di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:

1. **Proyeksi Jumlah Penduduk (Load)**

Infrastruktur berfungsi melayani aktifitas sosial dan ekonomi penggunanya (users). Pengguna infrastruktur dalam hal ini adalah penduduk di suatu wilayah yang akan memanfaatkan infrastruktur tersebut. Proyeksi jumlah penduduk diperlukan untuk mengetahui seberapa besar beban yang akan diterima infrastruktur tersebut di masa yang akan datang. Proyeksi jumlah penduduk tiap kecamatan dibuat untuk 20 tahun kedepan, dengan data basis proyeksi adalah jumlah penduduk tahun 2011 dari data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim. Metode yang digunakan dalam proyeksi jumlah penduduk adalah metode geometrik.

1. **Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur (Capacity)**

Metode yang digunakan dalam proyeksi kebutuhan infrastruktur kesehatan adalah dengan menggunakan Standard Pelayanan Minimal untuk infrastruktur yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001). Jumlah infrastruktur kesehatan eksisting per kecamatan di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada Tabel 1.

 Tabel 1. Data Lokasi Studi dan Jumlah Infrastruktur Kesehatan Eksisting Tahun 2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Luas Wilayah****(*Km*2)** | **Penduduk****(Jiwa)** | **Infrastruktur Kesehatan (Unit)** |
| **Puskesmas** | **Poskesdes** | **Pustu** |
| 1 | Semende Darat Ulu | 466,60 | 16.130 | 1 | 9 | 5 |
| 2 | Semende Darat Tengah | 419,93 | 9.884 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Semende Darat Laut | 274,75 | 13.160 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | Tanjung Agung | 539,97 | 38.287 | 1 | 29 | 9 |
| 5 | Lawang Kidul | 380,84 | 64.180 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Muara Enim | 203,80 | 62.851 | 1 | 10 | 9 |
| 7 | Ujan Mas | 268,70 | 23.691 | 1 | 8 | 4 |
| 8 | Gunung Megang | 666,40 | 57.565 | 2 | 13 | 4 |
| 9 | Benakat | 28.852 | 8.944 | 0 | 6 | 2 |
| 10 | Rambang Dangku | 62.824 | 51.492 | 2 | 18 | 7 |
| 11 | Talang Ubi | 648,40 | 68.641 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Tanah Abang | 156,60 | 27.797 | 1 | 14 | 4 |
| 13 | Penukal | 272,00 | 27.533 | 1 | 14 | 4 |
| 14 | Abab | 347,00 | 23.684 | 2 | 17 | 5 |
| 15 | Penukal Utara | 416,00 | 21.221 | 2 | 25 | 9 |
| 16 | Rambang | 522,62 | 28.044 | 1 | 7 | 8 |
| 17 | Lubai | 984,72 | 53.858 | 1 | 13 | 5 |
| 18 | Lembak | 388,07 | 31.576 | 1 | 26 | 10 |
| 19 | Gelumbang | 644,20 | 54.936 | 1 | 20 | 4 |
| 20 | Kelekar | 151,00 | 9.574 | 1 | 19 | 5 |
| 21 | Sungai Rotan | 19 | 30.612 | 1 | 7 | 1 |
| 22 | Muara Belida | 8 | 7.750 | 0 | 6 | 2 |
| **Jumlah**  | **9140,50** | **731.410** | **23** | **281** | **110** |

 *Sumber: BPS Kab. Muara Enim Tahun 2011*

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan infrastruktur dari awal hingga akhir periode desain yang diambil selama 20 tahun yaitu 2012 sampai dengan tahun 2032. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk yaitu metode aritmatik, *incremental increase* (peningkatan pertumbuhan) dan metode geometrik. Untuk memproyeksi jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim maka diperlukan data jumlah penduduk dan jumlah laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2011. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode geometrik, dimana metode ini digunakan untuk wilayah permukiman yang tidak terbatas. Tabel 2 di bawah ini menjelaskan mengenai proyeksi jumlah penduduk per 5 tahun pada tiap Kecamatan di Kabupaten Muara Enim dengan basis data penduduk tahun 2011.

4.2. Proyeksi Infrastruktur Kesehatan

1. **Puskesmas**

Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, 1 (satu) unit Puskesmas minimal melayani setiap 120.000 penduduk. Untuk jumlah penduduk menggunakan data pada tabel 2 dan perhitungan kebutuhan fasilitas dilakukan per Kecamatan. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Mengacu pada data di atas, maka dapat dianalisa yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Puskesmas yang ada pada tiap Kecamatan masih cukup untuk menampung seluruh pasien sampai tahun 2032 kecuali pada Kecamatan Benakat, Abab dan Muara Belida;
2. Pada Kecamatan Benakat, Abab dan Muara Belida perlu penambahan masing-masing sebanyak 1 (satu) puskesmas pada tahun 2012 – 2032;
3. Kecamatan lainnya selain Kec. Benakat, Abab dan Muara Belida tidak perlu penambahan Puskesmas sampai dengan tahun 2032 dan hanya perlu melakukan pemeliharaan terhadap puskesmas yang sudah ada.

 Tabel 2. Proyeksi Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Muara Enim

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
| **2012** | **2017** | **2022** | **2027** | **2032** |
| 1 | Semende Darat Laut | 13,425 | 14,829 | 16,380 | 18,094 | 19,987 |
| 2 | Semende Darat Tengah | 10,083 | 11,138 | 12,303 | 13,590 | 15,012 |
| 3 | Semende Darat Ulu | 16,454 | 18,176 | 20,077 | 22,178 | 24,498 |
| 4 | Tanjung Agung | 39,057 | 43,143 | 47,656 | 52,642 | 58,150 |
| 5 | Lawang Kidul | 65,470 | 72,320 | 79,886 | 88,244 | 97,476 |
| 6 | Muara Enim | 64,114 | 70,822 | 78,232 | 86,416 | 95,457 |
| 7 | Ujan Mas | 24,167 | 26,696 | 29,489 | 32,574 | 35,982 |
| 8 | Gunung Megang | 58,722 | 64,866 | 71,652 | 79,148 | 87,429 |
| 9 | Benakat | 9,124 | 10,078 | 11,133 | 12,297 | 13,584 |
| 10 | Talang Ubi | 70,021 | 77,346 | 85,439 | 94,377 | 104,251 |
| 11 | Abab | 24,160 | 26,688 | 29,480 | 32,564 | 35,971 |
| 12 | Penukal | 28,086 | 31,025 | 34,271 | 37,856 | 41,817 |
| 13 | Tanah Abang | 28,356 | 31,322 | 34,599 | 38,219 | 42,218 |
| 14 | Penukal Utara | 21,648 | 23,912 | 26,414 | 29,178 | 32,230 |
| 15 | Rambang Dangku | 52,527 | 58,022 | 64,093 | 70,798 | 78,206 |
| 16 | Lubai | 54,941 | 60,689 | 67,038 | 74,052 | 81,799 |
| 17 | Rambang | 28,608 | 31,601 | 34,907 | 38,559 | 42,593 |
| 18 | Gelumbang | 56,040 | 61,903 | 68,380 | 75,534 | 83,436 |
| 19 | Lembak | 32,211 | 35,581 | 39,303 | 43,415 | 47,957 |
| 20 | Sungai Rotan | 31,227 | 34,494 | 38,103 | 42,090 | 46,493 |
| 21 | Kelekar | 9,766 | 10,788 | 11,917 | 13,164 | 14,541 |
| 22 | Muara Belida | 7,906 | 8,733 | 9,647 | 10,656 | 11,771 |
| **Jumlah** | **746,111** | **824,171** | **910,398** | **1,005,645** | **1,110,858** |

 *Sumber: Hasil analisa*

Tabel 3. Proyeksi Jumlah Infrastruktur Kesehatan Puskesmas Per Kecamatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Infrastruktur Existing(Unit) | Jumlah Kebutuhan (Unit) |
| **2012** | **2017** | **2022** | **2027** | **2032** |
| 1 | Semende Darat Laut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Semende Darat Tengah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Semende Darat Ulu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tanjung Agung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Lawang Kidul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Muara Enim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ujan Mas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Gunung Megang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Benakat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Talang Ubi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Abab | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Penukal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Tanah Abang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Penukal Utara | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Rambang Dangku | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Lubai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Rambang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Gelumbang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Lembak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Sungai Rotan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Kelekar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Muara Belida | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Jumlah** | **23** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** |

*Sumber: Hasil analisa*

1. **Poskesdes**

Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, 1 (satu) unit Poskesdes minimal melayani setiap 3.000 penduduk. Untuk jumlah penduduk menggunakan data pada tabel 2 dan perhitungan kebutuhan fasilitas dilakukan per Kecamatan. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Mengacu pada data di atas, maka dapat dianalisa yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Puskesmas yang ada pada tiap Kecamatan masih cukup untuk menampung seluruh pasien sampai tahun 2032 kecuali pada Kecamatan Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Megang, Talang Ubi, Abab, Tanah Abang, Rambang Dangku, Lubai, Rambang dan Gelumbang;
2. Pada Kecamatan yang disebut di atas perlu penambahan fasilitas pada tahun 2032 yaitu sebagai berikut :
	1. Semende Darat Tengah 1 Unit
	2. Semende Darat Ulu 1 Unit
	3. Lawang Kidul 26 Unit
	4. Muara Enim 22 Unit
	5. Ujan Mas 4 Unit
	6. Gunung Megang 17 Unit
	7. Talang Ubi 17 Unit
	8. Abab 12 Unit
	9. Tanah Abang 1 Unit
	10. Rambang Dangku 2 Unit
	11. Lubai 21 Unit
	12. Rambang 2 Unit
	13. Gelumbang 2 Unit
3. Kecamatan lainnya selain yang disebut di atas tidak perlu penambahan Poskesdes sampai dengan tahun 2032 dan hanya perlu melakukan pemeliharaan terhadap Poskesdes yang sudah ada.

Tabel 4. Proyeksi Jumlah Infrastruktur Kesehatan Poskesdes Per Kecamatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Infrastruktur Existing(Unit) | Jumlah Kebutuhan (Unit) |
| **2012** | **2017** | **2022** | **2027** | **2032** |
| 1 | Semende Darat Laut | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | Semende Darat Tengah | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | Semende Darat Ulu | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Tanjung Agung | 29 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| 5 | Lawang Kidul | 7 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 |
| 6 | Muara Enim | 10 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 |
| 7 | Ujan Mas | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Gunung Megang | 13 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| 9 | Benakat | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 10 | Talang Ubi | 18 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 11 | Abab | 0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | Penukal | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Tanah Abang | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 14 | Penukal Utara | 17 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | Rambang Dangku | 25 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
| 16 | Lubai | 7 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 |
| 17 | Rambang | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 18 | Gelumbang | 26 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 |
| 19 | Lembak | 20 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | Sungai Rotan | 19 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 21 | Kelekar | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 22 | Muara Belida | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| **Jumlah** | **281** | **262** | **284** | **313** | **346** | **380** |

*Sumber: Hasil analisa*

1. **Puskesmas Pembantu**

Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, 1 (satu) unit Pustu minimal melayani setiap 30.000 penduduk. Untuk jumlah penduduk menggunakan data pada tabel 2 dan perhitungan kebutuhan fasilitas dilakukan per Kecamatan. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Mengacu pada data di atas, maka dapat dianalisa yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Puskesmas yang ada pada tiap Kecamatan masih cukup untuk menampung seluruh pasien sampai tahun 2032 kecuali Kecamatan Lawang Kidul;
2. Pada Kecamatan Lawang Kidul masih cukup untuk menampung pasien sampai dengan 2027 dan perlu penambahan sebanyak 1 (satu) Pustu pada tahun 2032;
3. Kecamatan lainnya selain yang disebut di atas tidak perlu penambahan Pustu sampai dengan tahun 2032 dan hanya perlu melakukan pemeliharaan terhadap Pustu yang sudah ada.

4.3. Rekapitulasi Infrastruktur Kesehatan

Dari hasil analisa proyeksi kebutuhan infrastruktur kesehatan pada tiap kecamatan di Kabupaten Muara Enim dari tahun 2012 hingga tahun 2032 dapat direkapitulasi kebutuhan tiap jenis infrastruktur kesehatan di Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2011, Puskesmas memiliki jumlah eksisting 23 unit yang tersebar di beberapa kecamatan. Dari hasil analisa tahun 2012 dibutuhkan 3 unit puskesmas tambahan dan pada tahun 2017 hingga 2032 tidak dibutuhkan penambahan puskesmas. Poskesdes memiliki jumlah eksiting sebanyak 281 unit pada tahun 2011. Jumlah tersebut tersebar pada tiap kecamatan. Dari hasil analisa dibutuhkan sebanyak 62 unit pada tahun 2012, 11 unit tahun 2017, 14 unit pada tahun 2022, 15 unit pada tahun 2027, dan 26 unit pada tahun 2032. Sedangkan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) jumlah eksisting sebanyak 110 unit dan butuh tambahan 1 unit hanya pada tahun 2032.

Tabel 4. Proyeksi Jumlah Infrastruktur Kesehatan Pustu Per Kecamatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Infrastruktur Existing(Unit) | Jumlah Kebutuhan (Unit) |
| **2012** | **2017** | **2022** | **2027** | **2032** |
| 1 | Semende Darat Laut | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Semende Darat Tengah | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Semende Darat Ulu | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tanjung Agung | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Lawang Kidul | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | Muara Enim | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Ujan Mas | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Gunung Megang | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Benakat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Talang Ubi | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | Abab | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Penukal | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Tanah Abang | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Penukal Utara | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Rambang Dangku | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Lubai | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Rambang | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Gelumbang | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Lembak | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Sungai Rotan | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Kelekar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Muara Belida | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Jumlah** | **110** | **35** | **41** | **42** | **45** | **48** |

*Sumber: Hasil analisa*

 Tabel 6. Proyeksi Jumlah Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Muara Enim

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Fasilitas** | **Jumlah Infrastruktur Existing****(Unit)** | **Penambahan (Unit)** |
| **2012** | **2017** | **2022** | **2027** | **2032** |
| *1.**2.**3.* | Puskesmas 3 UnitPoskesdes 128 UnitPustu 1 Unit | 23281110 | 362- | -11- | -14- | -15- | -261 |

 *Sumber: Hasil analisa*

**5. KESIMPULAN**

Analisa kebutuhan infrastruktur kesehatan pada tiap kecamatan di Kabupaten Muara Enim dari tahun 2012 hingga tahun 2032 dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Muara Enim membutuhkan penambahan 3 unit Puskesmas, 128 unit Poskesdes, dan 1 unit Puskesmas Pembantu untuk melayani kesehatan penduduk hingga akhir periode proyeksi.

Dalam realisasi pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah perlu merencanakan secara matang dalam menentukan lokasi dan faktor-faktor lainnya, diharapkan fasilitas tersebut mudah terjangkau oleh masyarakat dan dapat melayani masyarakat tersebut dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Asnudin, Andi., 2009, *“Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat”,* Jurnal SMARTek, Vol. 7, No. 4, Nopember 2009: 292 - 300, Universitas Tadulako, Palu.
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim., 2011, *“Muara Enim dalam Angka 2011,.* Muara Enim, Indonesia.
3. Departemen Pekerjaan Umum., 2001, *“Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum”,* Jakarta, Indonesia.
4. Hapsari, Tanjung., 2011, *“Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia.
5. [Harahap, Budi Mulia Warman](http://repository.usu.ac.id/browse?type=author&value=Harahap%2C+Budi+Mulia+Warman)., 2013, *“Analisis Pemanfaatan Sarana Infrastruktur Desa Terhadap Produktivitas Masyarakat Desa Di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat”,* Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
6. Raju, BSN, 1995, “*Water Supply and Wastewater Engineering”*, McGraw-Hill, New Delhi.